BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akurasi realisasi anggaran merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mampu merealisasikan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut OECD (2023), akurasi realisasi anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga kesesuaian antara target anggaran dan pelaksanaan anggaran melalui proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang baik. Semakin tinggi tingkat akurasi realisasi anggaran, semakin baik pula kualitas tata kelola keuangan daerah yang dihasilkan.

Pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi permasalahan dalam mencapai akurasi realisasi anggaran. Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi sering menimbulkan keterlambatan pelaksanaan program, rendahnya serapan anggaran, dan kurang optimalnya penggunaan dana publik. Mustafa *et al.* (2022) menyatakan bahwa rendahnya akurasi realisasi anggaran mencerminkan adanya kelemahan pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran sehingga target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai secara maksimal.

Fenomena tersebut juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Timur tahun 2022–2024, masih terdapat selisih antara anggaran dan realisasi belanja daerah setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belum

sepenuhnya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Rahmawati (2023) menjelaskan bahwa ketidaktepatan realisasi anggaran di Kabupaten Aceh Timur dipengaruhi oleh lemahnya sistem perencanaan kas dan belum optimalnya kemampuan aparatur dalam mengelola keuangan daerah.

Tabel 1. 1
Jumlah Belanja Anggaran vs Realisasi dan Selisih Kab Aceh Timur 2022-2024

Tahun	Jumlah Belanja (Anggaran) (Rp)	Jumlah Belanja (Realisasi) (Rp)	Selisih (Anggaran-Realisasi) (Rp)	% Realisasi
2024	1.992.315.803.729,00	1.956.175.991.024,89	36.139.812.704,11	98,19%
2023	1.866.107.185.160,00	1.796.206.428.832,85	69.900.756.327,15	96,25%.
2022	(pagu) 1.809.998.110.417,0 (pagu untuk pencapaian kinerja; lihat cat.)	1.769.569.785.313,44	40.428.325.103,56	97,77% (serapan) .

Sumber: *Laporan Realisasi Anggaran (konsolidasi) TA 2023 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (LRA TA 2022-2024).*

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun 2022–2024, terlihat bahwa realisasi anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang direncanakan. Pada tahun 2024, dari total anggaran sebesar Rp1,99 triliun, realisasi yang dicapai adalah Rp1,95 triliun atau 98,19%. Tahun 2023 juga menunjukkan kondisi serupa, di mana anggaran sebesar Rp1,86 triliun hanya terealisasi 96,25%. Sementara itu, pada tahun 2022, anggaran belanja sebesar Rp1,80 triliun terealisasi sebesar 97,77%. Meskipun tingkat realisasi belanja daerah berada pada kisaran 96%–98%, masih terdapat selisih antara anggaran dan realisasi pada setiap tahun. Selisih tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh anggaran yang direncanakan dapat

direalisasikan selama periode anggaran. Kondisi ini menjadi fenomena penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah perbedaan antara anggaran dan realisasi berkaitan dengan kualitas perencanaan kas dan kompetensi aparatur pengelola keuangan.

Pujiono (2024) menjelaskan bahwa *Cash Planning* merupakan proses penyusunan proyeksi arus kas masuk dan arus kas keluar yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan dana sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Sistem *Cash Planning* yang efektif dapat membantu pemerintah daerah menjaga likuiditas, menghindari kekurangan kas, serta meminimalkan terjadinya *idle cash* yang berpotensi menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Implementasi *Cash Planning* pada pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala. Aflina (2022) menemukan bahwa beberapa organisasi perangkat daerah mengalami perbedaan yang cukup besar antara rencana kas dan realisasi kas karena kurangnya integrasi sistem keuangan daerah dan lemahnya koordinasi antarunit kerja. Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan penarikan dana, ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, serta meningkatnya deviasi antara anggaran dan realisasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas *Cash Planning* masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan akurasi realisasi anggaran.

Selain sistem *Cash Planning*, kompetensi sumber daya manusia juga memiliki peran penting dalam meningkatkan akurasi realisasi anggaran. Kompetensi SDM mencerminkan kemampuan aparatur dalam memahami regulasi, mengelola anggaran, menggunakan sistem informasi keuangan, dan

menyusun laporan keuangan secara tepat. Menurut Yuliana *et al.,* (2023), aparatur yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih mampu melaksanakan proses pengelolaan keuangan daerah secara efektif sehingga risiko kesalahan administrasi dan penyimpangan anggaran dapat diminimalkan.

Peningkatan kompetensi aparatur masih menjadi tantangan bagi banyak pemerintah daerah. BKN (2023) menyatakan bahwa kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan dan memahami regulasi pengelolaan keuangan daerah masih belum merata. Mustafa *et al.*, (2022) juga menjelaskan bahwa rendahnya kompetensi aparatur dapat menyebabkan kesalahan dalam penganggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, dan rendahnya kualitas pelaporan keuangan. Akibatnya, tingkat akurasi realisasi anggaran menjadi sulit untuk dicapai secara optimal.

Cash Planning dan kompetensi SDM telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Khansa (2025) menemukan bahwa akurasi perencanaan kas dan kualitas SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Ayulia et al., (2025) juga membuktikan bahwa akurasi perencanaan kas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Sementara itu, Anggraeni et al., (2024) menemukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap realisasi penggunaan anggaran. Namun, sebagian besar penelitian tersebut menggunakan variabel dependen berupa penyerapan anggaran, realisasi penggunaan anggaran, atau kinerja pelaksanaan anggaran.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan akurasi realisasi anggaran sebagai variabel dependen. Selain itu,

penelitian ini mengombinasikan implementasi sistem *Cash Planning* dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akurasi realisasi anggaran daerah.

Penelitian ini menggunakan Teori Agensi dan Teori *Stewardship* sebagai landasan teoritis. Teori Agensi menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang menerima amanah masyarakat harus mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel melalui sistem pengendalian yang baik, salah satunya melalui implementasi *Cash Planning*. Sementara itu, Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi tinggi akan berupaya mengelola sumber daya publik secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, implementasi *Cash Planning* dan kompetensi SDM diduga mampu meningkatkan akurasi realisasi anggaran pada pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat permasalahan akurasi realisasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang ditunjukkan oleh adanya deviasi antara anggaran dan realisasi belanja daerah. Permasalahan tersebut diduga dipengaruhi oleh implementasi sistem *Cash Planning* yang belum optimal dan kompetensi sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, masih terbatasnya penelitian yang mengkaji kedua variabel tersebut terhadap akurasi realisasi anggaran menunjukkan pentingnya penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul **"Pengaruh Implementasi Sistem *Cash Planning* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akurasi Realisasi**

Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur" perlu dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antarvariabel tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah implementasi sistem *Cash Planning* berpengaruh terhadap akurasi realisasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap akurasi realisasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur?
3. Apakah implementasi sistem *Cash Planning* dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) secara simultan berpengaruh terhadap akurasi realisasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk:

1. Mengetahui pengaruh implementasi sistem *Cash Planning* terhadap akurasi realisasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
2. Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akurasi realisasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Mengetahui pengaruh implementasi sistem *Cash Planning* dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan terhadap akurasi realisasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi ilmiah dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, perencanaan kas *(Cash Planning),* dan akurasi realisasi anggaran. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan model teoritis mengenai hubungan antara sistem keuangan daerah, kompetensi aparatur, dan kinerja pengelolaan anggaran.

2. Manfaat Praktis

   Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam memperbaiki penerapan sistem *Cash Planning* agar lebih terintegrasi dengan sistem informasi keuangan daerah serta meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan.